



# Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Journal homepage: <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index>

## **Anco Amok: telaah historis atas peran GP Ansor dalam penumpasan PKI di Pamekasan 1965**

### **Anco Amok: historical review of GP Ansor role in the ruin of PKI in Pamekasan 1965**

**RP. M. Himam Awan Afghani**  
[himamawan26@gmail.com](mailto:himamawan26@gmail.com)

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jl. Kertamukti No.5, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Corresponding email: [himamawan26@gmail.com](mailto:himamawan26@gmail.com)

#### **ARTICLE INFO**

Received: February 02, 2024

Revised: June 09, 2024

Accepted: June 16, 2024

Published: June 30, 2024

#### **Permalink/DOI**

10.17977/um020v18i12024p90-105

Copyright © 2024.

Sejarah dan Budaya

Email: [jsb.journal@um.ac.id](mailto:jsb.journal@um.ac.id)

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

#### **How to Cite APA Style:**

Afghani, R.P.M.H.W. (2024). *Anco Amok: telaah historis atas peran GP Ansor dalam penumpasan PKI di Pamekasan 1965*. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 18(1), 90-105.

<https://doi.org/10.17977/um020v18i12024p90-105>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

#### **ABSTRACT**

*Anco Amok* is a name given to the 1965 purge of PKI members in Pamekasan. *Anco Amok* is a term given by Chinese ethnic to remember the event. *Anco Amok* comes from the Madurese language, which is known as *Ansor Ngamok*. From the naming of the event, it can be assumed that GP Ansor Pamekasan had a big role in the suppression of PKI in Pamekasan. The *Anco Amok* event involving GP Ansor Pamekasan as the main actor is described using a political sociology analysis by applying Ralph Dahrendorf's conflict theory. This research is a social history study using the historical method which in the process goes through four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Based on this research, the *Anco Amok* is closely related to the socio-political conditions that occurred in Pamekasan. The socio-political condition of Pamekasan at that time was dominated by the figure of kyai.

#### **KEYWORDS**

social movement; PKI movement; role of GP Ansor

#### **ABSTRAK**

*Anco Amok* merupakan istilah bagi peristiwa penumpasan anggota PKI di Pamekasan pada tahun 1965. *Anco Amok* merupakan sebutan yang diberikan oleh etnis Tionghoa untuk mengingat peristiwa tersebut. *Anco Amok* berasal dari bahasa Madura yakni *Ansor Ngamok*. Dari penamaan peristiwa tersebut, dapat diduga bahwa GP Ansor Pamekasan memiliki peran besar dalam penumpasan PKI di Pamekasan. Peristiwa *Anco Amok* yang melibatkan GP Ansor Pamekasan sebagai pelaku utama diuraikan menggunakan pendekatan sosiologi politik dengan menerapkan teori konflik Ralph Dahrendorf. Penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial dengan menggunakan metode sejarah yang dalam prosesnya melalui empat tahapan, yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian ini, peristiwa *Anco Amok* sangat berkaitan dengan kondisi sosial politik yang terjadi di Pamekasan. Kondisi sosial politik Pamekasan saat itu dikuasai oleh sosok kyai.

#### **KATA-KATA KUNCI**

gerakan sosial; gerakan PKI; peranan GP Ansor

## **PENDAHULUAN**

Peristiwa Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) merupakan salah satu bagian dari sejarah kelam Republik Indonesia. Peristiwa Gestapu hingga hari ini masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia; lebih-lebih dengan hadirnya film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang memberi gambaran detail kengeriannya. Film besutan sutradara Arifin C. Noer yang diproduksi pada tahun 1984 tersebut menggambarkan bagaimana peristiwa berdarah Gestapu terjadi. Pada era pemerintahan Orde Baru, film tersebut menjadi film yang wajib ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September. Bahkan di awal penayangannya, Orde Baru mewajibkan masyarakat untuk menonton film tersebut dengan tujuan mengingat kembali kengerian peristiwa tersebut; pemerintah Orde Baru menyebut PKI adalah dalang daripada peristiwa saat itu.

Terdapat beberapa versi sejarah peristiwa Gestapu. Pertama, rekonstruksi sejarah dari seorang sejarawan militer Kolonel Nugroho Susanto dan seorang peminat hukum dari militer Letnan Kolonel Ismail Saleh yang kemudian ditulis dalam bentuk buku berjudul *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Kedua, versi akademisi Cornell University Amerika yang menyatakan bahwa Gestapu merupakan buntut dari permasalahan internal TNI AD terkhusus Divisi Diponegoro, Jawa tengah. Peristiwa Gestapu menurut versi ini merupakan revolusi perwira menengah terhadap perwira tinggi dari Divisi Diponegoro karena para perwira tinggi dinilai telah meninggalkan semangat revolusi 1945 dengan hidup mewah, berfoya-foya, dan menghamburkan uang negara. Ketiga, versi sejarawan barat Antonie C.A. Dake yang menyatakan dalang di balik peristiwa Gestapu adalah presiden Soekarno, berdasar pada TNI AD yang sering berseteru dan berbeda pandangan politik dengan pemerintah Orde Lama. Keempat, sejarah Gestapu versi sejarawan Belanda W.F. Wertheim yang memberikan pernyataan bahwa dalang di balik malam berdarah tersebut adalah Soeharto, hal ini berdasar pada tiga pelaku Gestapu yakni Letkol Untung, Letkol Lathief, dan Syam Kamaruzzaman merupakan orang dekat Soeharto pada masa revolusi 1945. Kelima, versi mantan pejabat intelijen Amerika Peter Dale Scott. Versi ini memberikan pernyataan bahwa dalang dibalik Gestapu adalah CIA (*Central of Intelligence Agency*). Hal ini didasari dengan Amerika yang tidak suka dengan Soekarno karena memunculkan gagasan Demokrasi Terpimpin, meminta bantuan Uni Soviet dalam pembebasan Irian Barat, membentuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang, dan membuat konfrontasi dengan Malaysia (Suwirta, 2000).

Berbagai versi sejarah yang telah dijelaskan di atas memang menimbulkan perdebatan panjang, namun yang pasti adalah peristiwa itu merenggut nyawa enam perwira tinggi dan satu perwira pertama TNI AD yakni: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Soeprapto, Mayor Jenderal M. T. Harjono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Soetojo, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Lettu P. A. Tendean. Selain tujuh orang di atas, Jenderal A. H. Nasution juga menjadi target, namun berhasil lolos (Damm, 2017).

Berangkat dari kenyataan itu, maka peristiwa Gestapu memicu kemarahan masyarakat Indonesia sehingga terjadi penumpasan di berbagai daerah. Gerakan aksi penumpasan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat itu menempatkan PKI sebagai sasaran utama.

Pada saat terjadinya peristiwa Gestapu hingga sampai pada penumpasan di berbagai daerah, Nahdlatul Ulama' (NU) ikut mengambil peran. Dalam menyikapi persoalan PKI tubuh internal NU terbagi menjadi dua, McGregor dan Fealy membaginya ke dalam golongan akomodasionis (Golongan Tua) dan militan (Golongan Muda). Kelompok akomodasionis lebih memilih untuk membuka dialog dengan presiden Soekarno dan kelompok kiri, sedangkan golongan militan yang lebih konservatif memilih untuk berposisi secara radikal terhadap PKI dan menganggap kehadiran komunis akan mengancam identitas religius di Indonesia; kelompok inilah yang nantinya akan berperan penting dalam gerakan penumpasan PKI dan berpengaruh terhadap sikap PBNU (Fealy & McGregor, 2012). Pada tanggal 1 Oktober 1965 publik digemparkan dengan siaran radio pendemisioneran kabinet kerja yang dipimpin Soekarno dan menetapkan bahwa negara di bawah kekuasaan Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung. Pada saat itu, Kelompok akomodasionis atau golongan tua NU yakni Kyai Wahab Chasbullah dan Kyai Idham Chalid sedang tidak berada di Jakarta, hal ini dimanfaatkan oleh golongan militan untuk segera memberikan pernyataan sikap NU, militan NU segera melakukan pendekatan kepada Soeharto dan militer untuk melakukan kolaborasi yang berbuntut pada penyiaran kepada publik melalui radio bahwa PKI adalah dalang pemberontakan (Fealy & McGregor, 2012). Tidak berselang lama, setelah itu PBNU memberikan pernyataan dalam menyikapi hal tersebut. Pertama, mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya dengan sebutan "Gerakan 30 September". Kedua, menolak dan menentang pembentukan Dewan Revolusi. Langkah selanjutnya, PBNU menyiapkan Resolusi Mengutuk Gestapu yang ditanda tangani oleh organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) termasuk diantaranya yakni GP Ansor (Mun'im, 2013).

Dalam peristiwa penumpasan PKI yang terjadi di berbagai daerah, Nahdlatul Ulama' juga ikut mencatatkan namanya, meskipun di berbagai buku sejarah yang dijelaskan di sekolah hampir tidak ada yang menyebut peran NU dalam rangka penumpasan PKI. Namun, seiring berjalannya waktu banyak bermunculan saksi sejarah yang memberikan kesaksiannya mengenai NU. Dalam berbagai agenda gerakan penumpasan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) berperan penting dalam suksesnya gerakan. Gesekan antara GP Ansor dan PKI bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat masa itu. Beberapa kali GP Ansor dan PKI terlibat dalam beberapa konflik seperti halnya peristiwa Nongkorejo, di Kencong, Kediri, Kerep di Grogol, Kediri, Banyuwangi, Malang, Kanigoro, Prambon, Gayam, Surabaya, dan Sidoarjo (Bawono, 2018).

Terkait dengan penumpasan PKI, di Pamekasan terdapat sebuah peristiwa fenomenal yang disebut dengan *Anco Amok*. Istilah *Anco Amok* merupakan sebuah sebutan dalam pengucapan etnis Tionghoa untuk kalimat Ansor Ngamok; karena lidah orang Tionghoa kesulitan mengucapkan kalimat Ansor Ngamok. Penyebutan istilah *Anco Amok* disebabkan kekacauan yang terjadi saat itu banyak menyasar kepada orang-orang Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang ketakutan karena menjadi sasaran massa melihat banyak orang berseragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yakni sayap kependuan GP Ansor yang dipenuhi amarah menyisir seluruh sudut kabupaten Pamekasan; hal ini kemudian menyebabkan orang-orang Tionghoa menyebut peristiwa tersebut dengan *Anco Amok*. Dari penamaan peristiwa tersebut, dapat diduga bahwa GP Ansor Pamekasan memiliki peran

besar dalam penumpasan PKI di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian tentang telaah historis peran Gerakan Pemuda Ansor dalam penumpasan PKI di Pamekasan tahun 1965.

Penelitian yang berkaitan dengan gerakan penumpasan PKI telah beberapa kali dilakukan, beberapa diantaranya adalah tulisan Siddharth Chandra (2019), yang membahas tentang penumpasan simpatisan PKI yang terjadi di Jawa Tengah dan adanya keterlibatan kaum priyayi, santri, abangan yang tergabung dalam partai anti PKI dan TNI dalam mengorganisir penumpasan. Kemudian, penelitian Geoffrey Robinson (2017) yang menyatakan bahwa penumpasan PKI yang terjadi sudah direncanakan oleh pimpinan TNI. Selain itu, terdapat penelitian mengenai keikutsertaan GP Ansor dalam penumpasan PKI diantaranya yakni tulisan Greg Fealy dan Katharine E. McGregor (2010) yang menjabarkan mengenai peran NU dalam gerakan penumpasan PKI pada tahun 1965-1966. Dalam penelitiannya ia menjabarkan secara kronologis peran NU yang menggerakkan berbagai organisasi di dalamnya seperti Lesbumi, Sarbumusi, GP Ansor, Banser, Muslimat, Pertanu, dan PMII dalam melancarkan gerakan penumpasan yang dilakukan bersama TNI. Penelitian ini juga membahas telaah terhadap sikap NU yang mulanya merayakan keberhasilan penumpasan hingga polemik atas usaha rekonsiliasi terhadap korban yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kemudian, tulisan Aderika Nur Azizah (2017) tentang peristiwa penumpasan PKI yang terjadi di Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada peristiwa penumpasan PKI yang terjadi di Pamekasan atau yang masyhur dikenal dengan sebutan *Anco Amok*.

Dalam penelitian ini, dibatasi hanya pada pembahasan mengenai peran GP Ansor dalam penumpasan PKI yang terjadi di Pamekasan pada tahun 1965. Sehingga, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya yakni kondisi sosial politik Pamekasan pada masa pemerintahan presiden Soekarno yang diduga kuat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa penumpasan simpatisan PKI, kemudian bagaimana kronologi terjadinya peristiwa *Anco Amok*, dan bagaimana peran GP Ansor dalam peristiwa *Anco Amok*.

## **METODE**

Peristiwa penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Pamekasan Madura merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu; tepatnya pada tahun 1965. Peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak dapat diulang kembali, sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa, menguraikan penelusuran sejarah, dan mengidentifikasi sebab dan akibat dari Sejarah (Kartodirdjo, 1991). Metode penelitian sejarah terdapat empat tahapan penelitian yang digunakan, meliputi tahap Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, dan Historiografi. Berikut keterangan lebih rinci atas tahapan-tahapan tersebut:

### **Heuristik**

Penelitian ini menggunakan *Library Research* untuk menemukan sumber tertulis dan *Field Research* guna mendapatkan sumber tidak tertulis. Dalam proses *Library Research* yang dilakukan, dapat ditemukan berbagai sumber primer yang diperoleh dari koleksi Museum

Nahdlatul Ulama' di Surabaya dan dokumen visual yang diperoleh saat wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

1. Arsip "Surat PBNU Kepada Dewan Harian PP. GP Ansor tentang Sikap Tegas Terhadap Komunisme"
2. Arsip "Surat Pernyataan Pucuk Pimpinan GP Ansor atas Gerakan 30 September 1965"
3. Foto dokumentasi saat terjadinya peristiwa penumpasan PKI oleh GP Ansor di Pamekasan.

Adapun *Field Research* yang dilakukan menggunakan wawancara dengan Teknik Snowball. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam sebuah jaringan atau rantai hubungan dengan melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain (Nurdiani, 2014). Berikut adalah narasumber yang diwawancarai untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penumpasan PKI oleh GP Ansor di Pamekasan.

1. KH. RP. A. Nadjibul Khoir. Saksi hidup dalam peristiwa *Anco Amok* di Pamekasan, anak pertama Kyai Sya'roni Tjokro Soedarso ketua GP Ansor pada tahun 1965. Kyai Nadjib merupakan narasumber kunci dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di kediaman beliau di Pamekasan pada 15 Maret 2023.
2. KH. Marzuki Djufri, anak dari Kyai Djufri Marzuki. Kyai yang menjadi korban pembunuhan PKI. Wawancara dilakukan di kediaman beliau di Pamekasan pada 26 Maret 2023.
3. RP. Garuda Adikara. Saksi hidup dalam peristiwa *Anco Amok* di Pamekasan anak kandung Kyai Karim Adikara ketua BANSER Pamekasan tahun 1965. Wawancara dilakukan di kediaman beliau pada 16 Maret 2023.
4. Prof. Dr. Aminuddin Kasdi. Pelaku sejarah penumpasan PKI di Jawa Timur. guru besar sejarah UNESA (Universitas Negeri Surabaya) yang menekuni kajian PKI. Wawancara dilakukan di kediaman beliau di Surabaya pada 23 Maret 2023.

### **Verifikasi (Kritik Sumber)**

Verifikasi merupakan tahap kedua dalam proses penelitian sejarah, tahap ini diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Verifikasi terbagi menjadi dua macam cara yaitu: kritik *ekstern* dan kritik *intern*.

Dalam penelitian ini, kritik ekstern dilakukan dengan cara melakukan penelusuran identitas dan latar belakang penulis jika sumber yang didapat berbentuk soft file. Sedangkan, sumber yang didapat dalam bentuk hard file dilakukan pengecekan terhadap kondisi fisik meliputi kertas dan tinta yang digunakan. Sedangkan kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang telah didapat dengan pernyataan narasumber yang diperoleh setelah wawancara.

### **Interpretasi**

Dalam penelitian ini, informasi dan data yang telah ditemukan digabungkan menjadi satu lalu ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Dalam konteks penumpasan PKI oleh GP Ansor di Pamekasan, teori sosiologi politik yang digunakan adalah teori konflik milik Ralph Dahrendorf. Teori ini mengarahkan penafsiran agar terfokus dan terpusat dengan konflik yang terjadi antara PKI dan GP Ansor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Sosial-Politik Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno

Masa pemerintahan orde lama dimulai sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Istilah orde lama merupakan sebutan yang diberikan oleh Soeharto selaku presiden Republik Indonesia yang kedua kepada masa pemerintahan sebelumnya untuk menandai kepemimpinan presiden Soekarno. Masa pemerintahan orde lama terbagi ke dalam dua babak, yakni era Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1967) (Soejono & Leirissa, 2009).

Era Demokrasi Liberal ditandai dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 17 Agustus 1950, kemudian beralih kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat peralihan Indonesia dari RIS menjadi NKRI, Madura masih menjadi sebuah negara dengan R. A. A. Cakraningrat sebagai wali negara (Mufrodi et al., 2019). Pada saat itu terjadi pergolakan politik di tengah masyarakat Madura, sebagian besar menuntut terjadinya pembubaran negara Madura dan kembali kepada NKRI, sebagian yang lain mendukung terbentuknya negara Madura. Pada masa ini, timbul berbagai gerakan untuk menuntut pembubaran negara Madura, diantaranya terbentuknya organisasi Gerakan Perjuangan Madura yang berbasis di Pamekasan dan Panitia Perjuangan Madura pada 26 Februari 1948 di Jawa (Mufrodi et al., 2019).

Pada awal tahun 1950 tepatnya pada paruh akhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) kondisi politik di Pamekasan sangat berkaitan dengan pergolakan politik yang terjadi di Madura yakni munculnya berbagai gerakan yang menuntut untuk membubarkan negara Madura. Berbagai aksi demonstrasi sangat terasa di Pamekasan hal ini karena Massa yang menuntut pembubaran negara Madura menginginkan wali negara Madura saat itu R. A. A. Cakraningrat untuk segera meletakkan jabatannya. Namun, pada saat demonstrasi terjadi wali negara Madura jatuh sakit sehingga pemerintahan diambil alih oleh wakil wali negara R. Zainal Fattah yang bergelar R. Tumenggung Notoadikusumo yang juga menjabat sebagai bupati Pamekasan. Berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran negara Madura terjadi di Pamekasan ("Demonstratie in Pamekasan," 1950).

Setelah berbagai aksi demonstrasi yang terjadi, R. Zainal Fattah melaporkan kepada pemerintah RI di Yogyakarta mengenai situasi politik di Madura dan mendesak kepada pemerintah untuk segera memberi keputusan bahwa Madura telah bergabung kembali dengan republik. Dalam koran *De Locomotief* rubrik *Wat er feitelijk gebeurde; Aanvaardde de regent van Pamekasan bestuur voor negara of Republiek?* Menunjukkan bahwa pada saat itu R. Zainal Fattah selalu menyatakan bahwa dia menjalankan kewenangannya bukan sebagai wali negara Madura melainkan sebagai Bupati dibawah naungan Republik Indonesia ("*Wat Er Feitelijk Gebeurde; Aanvaardde de Regent van Pamekasan Bestuur Voor Negara of Republiek?*" 1965).

Selain peristiwa pembubaran negara Madura, pada era Demokrasi Liberal terjadi peristiwa besar berskala nasional yakni Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955. Kabupaten Pamekasan yang merupakan bagian dari Madura juga ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Di Pulau Madura, Nahdlatul Ulama berhasil menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara kurang lebih 591.000 suara, Kemudian Masyumi dengan perolehan kurang

lebih 134.000 suara, lalu PNI dengan 88.000 suara, Sedangkan PKI menduduki peringkat terakhir dengan perolehan kurang lebih 3000 suara (Feith, 1971). Dalam hal ini, salah satu putra Pamekasan terpilih menjadi anggota konstituen melalui partai NU yakni KH. Muhammad Toha.

Kemenangan Nahdlatul Ulama' di Madura bukan tanpa alasan, hal ini sangat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Pamekasan saat itu. Masyarakat Pamekasan yang juga merupakan bagian dari etnis Madura yang menempatkan Kyai sebagai sosok yang sangat dihormati dan disegani. Kyai bukan hanya tempat masyarakat Madura untuk berkonsultasi hal-hal terkait agama, tapi juga berbagai hal lainnya seperti masalah rumah tangga, jodoh, meminta nama anak, bahkan juga masalah politik dan ekonomi. Oleh karena itulah maka bagi masyarakat Madura, Kyai adalah sosok panutan yang segala ucapan dan perbuatannya harus diikuti. Berbeda atau bertentangan dengan sikap dan ucapan Kyai adalah hal yang amat dihindari bahkan dianggap sebagai perbuatan tabu yang memalukan dan diyakini akan membawa dampak buruk bagi mereka.

Masyarakat Madura yang menempatkan Kyai dalam posisi penting tertuang dalam sistem hirarki penghormatan dalam adat istiadat mereka. Sistem hierarki penghormatan tersebut tertuang dalam ungkapan *Buppa'-Babu'-Guruh-Ratoh*. Pertama, *Buppa'-Babu'* memiliki arti Ayah-Ibu yang merupakan elemen utama dalam tatanan keluarga yang harus dihormati. Kedua, *Guruh* memiliki arti guru, dalam hal ini dipahami juga sebagai sosok Kyai yang telah ikhlas membimbing umat. Ketiga, *Ratoh* memiliki arti ratu, raja, atau pemerintah (Kosim, 2007). Dalam hal ini, sangat wajar KH. Muhammad Thoha terpilih sebagai anggota konstituante melalui partai NU. KH. Muhammad Thoha adalah seorang kyai pengasuh Pondok Pesantren Sumbergajam Pamekasan saat itu. Status KH. Muhammad Thoha sebagai seorang Kyai Pesantren tentu memiliki basis dan kekuatan yang besar di masyarakat Pamekasan.

Pada tahun 1960 yakni pada era Demokrasi Terpimpin, pemerintah Indonesia saat itu membuat undang-undang hukum tanah nasional sebagai UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No.5/1960. Undang-undang ini kemudian menyiapkan kerangka untuk perundangan dan peraturan selanjutnya yakni Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki persoalan pertanahan yang sebelumnya menggunakan undang-undang warisan kolonial. Undang-undang warisan kolonial tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat pribumi. Namun, dalam pelaksanaannya undang-undang ini melahirkan polemik di tengah masyarakat, hal ini disebabkan oleh golongan masyarakat agamis yang menganggap bahwa konsep tersebut menyalahi prinsip keagamaan atas pemilikan tanah. Hal ini di dasarkan pada pemahaman bahwa hak milik terhadap tanah tidak bisa dilepaskan dari seseorang yang telah mendapat warisan dari generasi sebelumnya, terlebih lagi terhadap status daripada tanah wakaf untuk masjid, tanah laba pura untuk candi dan tanah yang telah dimiliki oleh gereja (Achdian, 2008). Namun, pada akhirnya dimunculkan sebuah jalan tengah yakni dengan penawaran kepemilikan maksimum dan minimum; berdasarkan PERPU no. 56 tahun 1960 kepemilikan tanah maksimum berada pada angka 20 hektar dan kepemilikan minimum 2 hektar. Dalam pelaksanaannya, UUPBH dan UUPA tidak berjalan secara maksimal akibat persekongkolan antara pejabat pemerintahan dan golongan petani kaya (Achdian, 2008). Hal ini

mendapatkan respon dari Barisan Tani Indonesia (BTI) organisasi tani yang berafiliasi dengan PKI dengan menegaskan kepada para petani agar para dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut tidak bergantung pada pemerintahan, akan tetapi para petani harus turut andil dalam memperoleh haknya dengan tangannya sendiri. Hal ini kemudian sering menimbulkan gerakan radikal (Kasdi, 2009).

Dalam pengimplementasian UUPA dan UUPBH, BTI seringkali menggunakan aksi radikal yang revolusioner yang selalu berakhir dengan konflik; seperti yang terjadi di Jawa, Madura, Bali, Lombok, dan Sumatera Selatan. Konflik yang terjadi selalu melibatkan antara petani tak bertanah dengan tuan tanah. Konflik yang terjadi menjadi semakin buruk pada saat yang berkonflik berafiliasi dengan suatu partai politik. Pada saat itu mayoritas dari tuan tanah adalah anggota dari partai NU dan PNI, sedangkan para petani yang tidak bertanah mendapat dukungan dari PKI.

Di tengah kekacauan yang terjadi akibat perseteruan antara NU dengan PKI, Masyarakat Pamekasan yang religius dan kental dengan adat dan istiadat menjadikan sosok Kyai sebagai panutan sekaligus seseorang yang dapat dipercaya. Karena hal itu, fatwa Kyai pada saat itu sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Pamekasan. Tidak hanya itu, selayaknya menjaga harga dirinya, masyarakat Pamekasan memberikan penjagaan yang sama bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, hal ini sejalan dengan pribahasa *bhango'an apoteya tolang ethembang apoteya mata* yang secara sederhana dapat diartikan dengan lebih baik mati daripada harus menanggung malu.

Pada saat itu, masyarakat Pamekasan menganggap PKI adalah golongan anti Tuhan yang harus dibasmi. Hal ini sejalan dengan narasi yang dibangun oleh NU sendiri, koran Duta Masyarakat yang memiliki *image* sebagai suara daripada partai NU menulis sebuah artikel bertajuk "Tidak Ada Kompromi Dengan Orang Anti Tuhan; Amankan Negara Dengan Mental Ketuhanan", hal ini menunjukkan bahwa NU menganggap PKI adalah golongan Anti Tuhan. Selain itu, PBNU juga mengirimkan surat kepada pucuk pimpinan GP Ansor yang berisi tentang instruksi pengawasan dan kewaspadaan terhadap komunisme (Arsip surat PBNU kepada pimpinan pusat GP Ansor, 06 Juni 1954).

Anggapan PKI adalah golongan anti Tuhan beredar luas di tengah masyarakat Pamekasan karena para Kyai dalam setiap ceramahnya selalu menyelipkan narasi perlawanan terhadap PKI. Pada saat yang sama, PKI juga menganggap Kyai adalah golongan borjuis-feodal yang harus dibasmi. KH. RP. A. Nadjibul Khoir keturunan langsung kyai sya'rani dan seorang saksi mata mengatakan bahwa sebagai akibat dari justifikasi PKI terhadap kalangan Kyai membuat kebencian masyarakat Pamekasan terhadap PKI semakin besar. Selain itu, Kondisi Pamekasan menjadi tidak kondusif, kebencian yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat juga dibarengi rasa takut karena di daerah lain PKI sudah melakukan gerakan yang radikal. Masyarakat Pamekasan melakukan peningkatan kewaspadaan, hal ini juga dilakukan kepada Kyai para pemuda yang tergabung dalam GP Ansor berjaga untuk keselamatan para Kyai.

## **PERAN GP ANSOR DALAM PENUMPASAN PKI DI PAMEKASAN PADA TAHUN 1965**

### **Pemicu Awal Terjadinya Peristiwa *Anco Amok***

Dua bulan sebelum terjadinya peristiwa Gestapu, di Pamekasan terjadi sebuah peristiwa yakni terbunuhnya seorang Kyai kharismatik bernama Djufri Marzuqi. Ia merupakan salah seorang tokoh Kyai yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat Pamekasan karena menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Sumber Batu, Blumbungan, Pamekasan Madura. Bukan hanya sekedar Kyai, tapi ia juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan bergabung menjadi laskar Sabilillah. Selain itu, Kyai Djufri juga aktif dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama Pamekasan.

Pembunuhan Kyai Djufri terjadi pada tanggal 28 Juli 1965, tepat dua bulan sebelum tragedi Gestapu terjadi. Peristiwa terbunuhnya Kyai Djufri berawal ketika Kyai Djufri mendapat undangan ceramah di Desa Durjan Bangkalan. Undangan tersebut berasal dari tokoh agama desa Durjan bernama Haji Musthofa. Undangan ini berawal dari usulan seseorang bernama Sarpin yang meminta kepada H. Musthofa untuk mengundang KH. Djufri Marzuqi mengisi pengajian umum di desa Durjan. Sarpin yang mengusulkan acara tersebut bersedia untuk menanggung segala akomodasi yang dibutuhkan ([Utsman, n.d.](#)).

Pada hari Selasa 27 Juli 1965, Kyai Djufri Marzuqi bersama seorang santri bernama Muhammad Syakir melakukan perjalanan menuju Bangkalan. Kyai Djufri kemudian mengisi pengajian, lalu beristirahat di kediaman H. Musthofa. Pada hari Rabu 28 Juli 1965 di waktu subuh, Kyai Djufri pamit kepada H. Musthofa untuk kembali pulang ke Pamekasan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih sejauh 15 KM yakni di Dusun Bungkok, Desa Batorasang, Tambelengan, Sampang, Kyai Djufri meminta rombongan yang mengiringinya untuk pergi terlebih dahulu. Hal ini karena Kyai Djufri ingin buang air kecil; Saat itu Kyai Djufri hanya ditemani Sarpin yang memegang pelana kuda.

Pada saat Kyai Djufri buang air kecil, Sarpin bertugas untuk menjaga kuda. Kemudian, saat Kyai Djufri akan bersiap-siap untuk menaiki kudanya seketika Sarpin menusuk punggung Kyai Djufri dengan pisau. Sarpin menusuk Kyai Djufri secara terus-menerus. Kyai Djufri sempat memberi perlawanan dan berteriak. Namun Kyai Djufri akhirnya tumbang karena terlalu banyak kehilangan darah. Teriakan Kyai Djufri didengar oleh rombongan yang sudah berada di depan, sehingga orang-orang segera kembali untuk memastikan keadaan Kyai Djufri. Pada saat rombongan sudah berada tepat di sumber teriakan, Kyai Djufri sudah tersungkur di tanah; sedangkan Sarpin lari menyelamatkan diri. Namun akhirnya Sarpin bisa ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib ([Minhadji, 1967](#)).

Peristiwa terbunuhnya Kyai Djufri Marzuqi menjadi pukulan berat bagi warga NU Pamekasan. Hal ini karena Kyai Djufri adalah sosok Kyai muda kharismatik yang diidolakan masyarakat Pamekasan saat itu. Tidak hanya di Pamekasan, berita terbunuhnya Kyai Djufri juga menjadi pukulan berat bagi para NU. KH. Idham Chalid selaku ketua umum PBNU saat itu menghadiri peringatan 40 hari wafatnya Kyai Djufri dan memberikan gelar *Assyahidul Kabir* untuk mengenang jasanya ([Minhadji, 1967](#)).

Pasca terbunuhnya Kyai Djufri, GP Ansor Pamekasan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian Pamekasan untuk menuntut keadilan dalam peristiwa tersebut. Namun, berdasarkan pada wawancara dengan KH. Marzuqi Djufri, seorang keturunan langsung dari KH. Djufri Marzuqi, mengatakan bahwa kepolisian Pamekasan saat itu menganggap bahwa

terbunuhnya Kyai Djufri hanya sebuah pembunuhan perampokan biasa saja. Aparat kepolisian saat itu tidak melakukan pengusutan lebih lanjut motif sebenarnya pembunuhan Kyai Djufri. Hal ini memunculkan kekecewaan di tubuh GP Ansor Pamekasan ([Wawancara Dengan Marzuqi Djufri, 26 Maret 2023](#)).

GP Ansor yang merasa kecewa terhadap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian segera melakukan Gerakan mandiri untuk memastikan motif apa yang mendasari Sarpin melakukan pembunuhan tersebut. KH. Moh. Sya'roni, ketua GP Ansor saat itu, melakukan penyamaran menjadi seorang tahanan. Kyai Sya'roni meminta untuk ditempatkan satu sel tahanan dengan Sarpin. Pada saat Kyai Sya'roni melakukan penyamaran tersebut, Kyai Sya'roni mendapatkan fakta bahwa Sarpin adalah suruhan PKI. Tidak lama setelah mendapati fakta itu, Sarpin secara tiba-tiba ditemukan tewas di dalam sel tahanannya ([Yakin, 2006](#)).

Dua bulan pasca terjadinya pembunuhan terhadap Kyai Jufri Pamekasan, terjadi peristiwa berdarah; yakni terjadinya peristiwa GESTAPU di Jakarta. Peristiwa ini membunuh enam perwira tinggi dan satu perwira tamtama TNI Angkatan Darat. Terjadinya GESTAPU, ditambah lagi dengan pemerintah yang menjadikan PKI sebagai pelaku menimbulkan kemarahan masyarakat Indonesia tidak terkecuali GP Ansor. Setelah peristiwa pemberontakan tersebut, di berbagai daerah terjadi berbagai penumpasan terhadap simpatisan PKI. Di Jawa Timur terjadi penumpasan PKI yang dilakukan oleh GP Ansor, seperti halnya peristiwa yang terjadi di Banyuwangi, Kediri dan tidak terkecuali di Pamekasan.

### **Peristiwa Anco Amok**

*Anco Amok* merupakan sebutan yang diberikan kepada peristiwa penumpasan PKI di Pamekasan oleh orang-orang Tionghoa. Sebutan ini berasal dari bahasa Madura yakni *Ansor Ngamok* yang memiliki arti Ansor Marah. Berawal dari *Ansor Ngamok* menjadi *Anco Amok* karena saat itu orang-orang Tionghoa masih kental dengan dialeknya. Berdasarkan kesaksian yang diceritakan oleh KH. RP. A. Nadjibul Khoir sebutan tersebut terdengar saat orang-orang Tionghoa yang banyak menjadi target amukan massa meneriakkan sebutan tersebut untuk memberitahukan kepada orang-orang agar segera bersembunyi ([Wawancara Dengan Nadjibul Khoir, 15 Maret 2023](#)). Gerakan penumpasan PKI di Pamekasan pelaksanaannya lebih lamban jika dibandingkan dengan penumpasan PKI di daerah-daerah lain. Jika di daerah-daerah lain penumpasan PKI secara massif dilakukan pada bulan Oktober atau November, penumpasan PKI di Pamekasan terjadi pada bulan Desember 1965, yakni dua bulan setelah GESTAPU. Keterlambatan tersebut bukan karena tidak muncul kemarahan di tengah masyarakat, tapi lebih kepada sikap untuk lebih berhati-hati karena pada saat itu tidak jelas mana anggota PKI dan mana yang bukan; termasuk dalam tubuh aparat ([Wawancara Dengan Nadjibul Khoir, 15 Maret 2023](#)).

Pada bulan Desember 1965, GP Ansor Pamekasan mengadakan apel akbar di depan karesidenan yang diikuti oleh berbagai golongan masyarakat. Apel tersebut bertujuan menunjukkan kekuatan (*show off force*) kepada musuh negara saat itu, yakni PKI. Dalam pelaksanaan apel akbar ini, KH. RP. Moh. Sya'rani Tjokro Soedarso ketua GP Ansor Pamekasan 1965 menjadi pemimpin apel yang diikuti oleh berbagai macam golongan masyarakat, diantaranya adalah PNI (Partai Nasional Indonesia), Gerakan Pemuda Sosialis,

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan Warga Muslimin Tionghoa Pamekasan. Ditunjuknya sosok Kyai Sya'roni sebagai pemimpin apel ini dikarenakan masyarakat Pamekasan sangat menghormati Kyai sebagai sosok yang penting dalam kehidupan masyarakat Pamekasan; sejalan dengan ungkapan *Buppa', Babu', Guruh, Ratoh*.



Gambar 5. KH. RP. M. Sya'roni Tjokro Soedarso sedang memimpin apel akbar.  
(sumber: koleksi pribadi keluarga KH. RP. M. Sya'roni)

Pada mulanya, apel akbar berjalan dengan khidmat dan lancar. Namun, setelah apel berakhir suasana menjadi tidak terkendali, peserta apel mengamuk hingga memaksa masuk ke dalam karesidenan. Berdasarkan kesaksian Kyai Nadjibul Khoir Hal ini karena ditemukan bendera dan berbagai macam atribut PKI di dalam karesidenan ([Wawancara Dengan Nadjibul Khoir, 15 Maret 2023](#)). Peserta apel segera merobek dan merusak segala bentuk atribut PKI yang dijumpai di dalam karesidenan. Amarah peserta apel memuncak. Peserta apel yang telah tersulut emosi melakukan *sweeping* untuk mencari anggota PKI yang masih ada di Pamekasan. Kegiatan *sweeping* anggota PKI dipimpin oleh KH. RP. Moh. Sya'roni ketua GP Ansor Pamekasan. Pada saat itu terjadi, kondisi Pamekasan tidak kondusif, masyarakat dipenuhi oleh kemarahan dan melakukan gerakan penumpasan secara membabi buta. Hal ini karena pemerintahan dan ABRI saat itu tidak melakukan apapun, sehingga situasi menjadi kacau dan semakin liar.



Gambar 5. Massa apel akbar di depan karesidenan Pamekasan.  
(sumber: koleksi pribadi keluarga KH. RP. M. Sya'roni)

GP Ansor Pamekasan mencari-cari anggota PKI di seantero Pamekasan untuk ditangkap; bahkan juga ada yang dieksekusi. Berdasarkan kesaksian yang didapat melalui wawancara dengan RP. Garuda Adikara keturunan langsung dari KH. RP. Abdul Karim Adikara ketua BANSER Pamekasan saat itu menyatakan bahwa pencarian anggota-anggota PKI menggunakan daftar nama yang telah dimiliki oleh GP Ansor Pamekasan melalui Munifson ketua PMII cabang Pamekasan ([Tim Redaksi Koran Duta Masyarakat, 1965](#)) yang sebelumnya telah menyusup ke dalam tubuh PKI. Gerakan penumpasan yang dilakukan oleh GP Ansor ini dilakukan bersama masyarakat yang juga membenci PKI. GP Ansor melakukan penumpasan bersama masyarakat secara mandiri, tidak bersama dengan ABRI ([Wawancara Dengan Garuda Adikara, 16 Maret 2023](#)).

GP Ansor bersama masyarakat Pamekasan yang dipimpin oleh Kyai Sya'roni langsung menuju toko Bandung yang terletak di seberang karesidenan Pamekasan milik orang Tionghoa yang diduga kuat menjadi tempat kegiatan PKI. Di dalam toko Bandung ditemukan granat dan senjata, selain itu juga ditemukan terowongan yang diduga menjadi tempat pelarian para anggota PKI ([Yakin, 2006](#)). Setelah mendapati temuan di dalam toko Bandung, kemudian *sweeping* dilakukan di seluruh sudut kota Pamekasan.

GP Ansor bersama masyarakat Pamekasan yang melakukan *sweeping* menjadikan gudang-gudang tembakau, dan toko milik orang Tionghoa sebagai target. Masyarakat Pamekasan yang telah diliputi kemarahan membakar banyak gudang-gudang tembakau dan toko milik warga Tionghoa ([John, 1986](#)). Hal ini karena ada anggapan yang beredar di tengah masyarakat Pamekasan bahwa orang-orang Tionghoa membantu pergerakan PKI. Anggapan tersebut dapat dilihat dari narasi yang dibangun oleh koran Warta Bhakti yang merupakan penerus daripada koran *Sin Po* milik Tionghoa, dalam koran yang diterbitkan pada 01 Oktober 1965 terdapat artikel di halaman utama bertajuk "RRI Djakarta Mengumumkan: Letnan Kolonel Untung dari Tjakrabirawa Selamatkan Presiden Soekarno dan RI; Semata-mata Gerakan dalam Angkatan Darat". Dalam artikel tersebut tidak ada narasi hujatan dan kutukan terhadap dewan revolusi yang dibentuk oleh Letkol Untung. Bahkan, narasi yang dibangun membenarkan perlakuan Dewan Revolusi ("[Letnan Kolonel Untung Dari Tjakrabirawa Selamatkan Presiden Soekarno Dan RI; Semata-Mata Gerakan Dalam Angkatan Darat,](#)" 1965).

Pada saat pencarian anggota PKI, banyak diantara mereka melarikan diri, beberapa diantaranya berhasil ditangkap dan ditahan. Namun, beberapa orang melakukan perlawanan sehingga akhirnya dieksekusi. Berdasarkan kesaksian, wilayah Gledeg Anyar sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Pamekasan menjadi pusat penumpasan, karena banyak anggota PKI ditemukan di tempat tersebut. Selain itu, berdasarkan kesaksian Garuda Adikara beberapa anggota PKI yang melawan dibawa menuju daerah Nyalaran sebuah dusun di daerah dekat Blumbungan, tepatnya di sekitar pemandian Nyalaran untuk dieksekusi.

### **Peran GP Ansor dalam Peristiwa *Anco Amok* di Pamekasan**

Pada rentang tahun 1960-an, Nahdlatul Ulama melakukan kerjasama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan berupa berbagai pelatihan yang akan diterapkan di dalam Banser (Barisan Ansor Serbaguna). Dalam

rangka penumpasan PKI di berbagai daerah, GP Ansor melakukannya dengan bantuan ABRI. Di Jawa Timur, Panglima Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya saat itu yakni Basuki Rachmat membentuk Operasi Pancasila dalam rangka penumpasan PKI di Jawa Timur. Operasi Pancasila menginstruksikan menggunakan kekuatan sipil untuk menyukseskan penumpasan PKI, dalam hal ini GP Ansor juga termasuk kekuatan sipil yang dimaksud dalam Operasi Pancasila (Leksana, 2020).

Pihak TNI saat itu memberikan izin kepada berbagai kekuatan sipil untuk melakukan aksi mandiri. Dalam hal ini, berdasarkan kesaksian Aminuddin Kasdi seorang pelaku aktif penumpasan PKI di Jawa Timur menuturkan bahwa gerakan GP Ansor yang berada di Jawa Timur menggunakan pola penumpasan yang hampir sama yakni dengan menandai rumah-rumah yang diduga kuat milik anggota PKI yang kemudian dijemput paksa untuk ditangkap dan beberapa juga dieksekusi. Suasana yang berbeda dapat ditemukan dalam tragedi penumpasan PKI yang dilakukan oleh GP Ansor di Pamekasan. Meskipun Pangdam V Brawijaya Jawa Timur telah membentuk Operasi Pancasila, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan RP. Garuda Adikara Kodim Pamekasan tidak melakukan apapun dalam merespon instruksi tersebut. Hal ini sudah dirasakan oleh GP Ansor Pamekasan sejak penanganan kasus pembunuhan Kyai Djufri yang tidak ditangani secara serius.

Penumpasan PKI di Pamekasan dilakukan secara mandiri. Penumpasan dilakukan dengan dipimpin oleh Kyai Sya'roni ketua GP Ansor saat itu. Kemudian, *sweeping* yang dilakukan Sebagian besar berdasarkan daftar nama-nama yang telah didapatkan Munifson salah seorang anggota GP Ansor yang menyusup ke dalam tubuh PKI untuk mencari informasi. Kemudian, sisanya dilakukan secara acak dengan menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai sasaran utama, gudang-gudang tembakau dan penjarahan toko-toko milik orang Tionghoa terjadi dimana-mana (John, 1986).

Anggapan etnis Tionghoa sebagai antek PKI dan kebencian masyarakat Pamekasan ikut dibawa pada penumpasan PKI yang dilakukan oleh GP Ansor. Akhirnya terjadi gerakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Pada saat penumpasan terjadi, kondisi Pamekasan menjadi sangat menakutkan khususnya bagi masyarakat Tionghoa. Orang-orang Tionghoa Pamekasan yang ketakutan memberi sebutan kepada peristiwa ini dengan istilah *Anco Amok*.

Pada saat penumpasan terjadi, Orang-orang Tionghoa yang menjadi sasaran adalah orang yang diduga kuat membantu PKI. Namun, tidak semua warga etnis Tionghoa menjadi sasaran. Beberapa orang Tionghoa bahkan mendapat perlindungan dan perlakuan istimewa dari GP Ansor. Hal ini karena beberapa orang-orang Tionghoa sudah memeluk agama Islam, bahkan ada yang tergabung dalam GP Ansor; berdasarkan penuturan Garuda Adikara diketahui bahwa warga Tionghoa yang tergabung dalam GP Ansor diantaranya bernama Tjong Ing dan Puy. Selain itu, warga Tionghoa yang beragama Islam juga membuat sebuah perkumpulan yang diberi nama Warga Muslimin Tionghoa Pamekasan yang juga turut aktif dalam berbagai kegiatan GP Ansor.

Dalam hal ini, GP Ansor Pamekasan berusaha untuk meminimalisir korban salah sasaran khususnya masyarakat etnis Tionghoa yang tengah menjadi sasaran amukan massa. Ketua GP Ansor saat itu yakni Kyai Sya'roni menjadikan pesantrennya yakni Pesantren Darussalam menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Islam.



Gambar 5. Perkumpulan warga muslimin Tionghoa Pamekasan yang berfoto dengan membawa bendera GP Ansor.

(sumber: koleksi pribadi keluarga KH. RP. M. Sya'roni)

## KESIMPULAN

Kondisi sosial-politik Pamekasan pada masa Orde Lama merupakan salah satu faktor pemicu daripada meledaknya amarah masyarakat kepada simpatisan PKI. Kuatnya pengaruh seorang Kyai di masyarakat, membuat Masyarakat mau melakukan apapun untuk mentaati dan melindungi bahkan dengan taruhan nyawanya sendiri. Terbunuhnya KH. Djufri Marzuqi seorang ulama muda kharismatik pada saat itu, menjadi pukulan yang mendalam bagi masyarakat Pamekasan. Sehingga, amarah masyarakat tidak bisa lagi dibendung dan menimbulkan terjadinya tragedi penumpasan PKI di Pamekasan yang dikenal dengan *Anco Amok*.

Peristiwa *Anco Amok* terjadi pada Desember 1965, perbedaan selisih bulan dengan terbunuhnya KH. Djufri Marzuqi karena GP Ansor tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. GP Ansor Pamekasan melakukan penelusuran secara mandiri untuk menemukan pembunuh KH. Djufri Marzuqi, disamping itu GP Ansor Pamekasan juga melaksanakan perintah dari pucuk pimpinan GP Ansor pusat untuk mempertinggi kewaspadaan dan penjagaan, khususnya memberikan pengamanan lebih terhadap para kyai (Arsip Surat PP. GP Ansor Kepada Seluruh Cabang, 01 Oktober 1965).

Pada akhirnya, saat GP Ansor yang diketuai oleh KH. RP. Moh. Sya'roni bersama masyarakat Pamekasan melakukan apel akbar didepan karesidenan dengan tujuan *show off force* terhadap PKI, pada saat itu masyarakat melihat simbol-simbol PKI di dalam karesidenan, sehingga amarah masyarakat memuncak berujung pada perobekan simbol-simbol PKI dan *sweeping* untuk mencari simpatisan PKI untuk diberantas. Dalam hal ini, GP Ansor menjadi pemimpin gerakan penumpasan.

Pada saat peristiwa *Anco Amok* terjadi, masyarakat etnis Tionghoa menjadi sasaran utama. Hal ini didasari dengan adanya anggapan bahwa masyarakat Tionghoa adalah antek-antek PKI. Dalam hal ini, Kyai Sya'roni selaku ketua GP Ansor Pamekasan saat itu menjadikan Pondok Pesantren Darussalam miliknya menjadi tempat berlindung bagi masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Islam khususnya yang aktif dalam kepengurusan Ansor agar tidak terjadi salah sasaran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achdian, A. (2008). *Tanah bagi yang tak bertanah; landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin*. Kekal Press.
- Arsip Surat PBNU Kepada PP. GP Ansor, *Sekitar sikap tegas terhadap komunisme*, 06 Juni 1954.
- Azizah, A. N. (2017). *Peran GP Ansor dalam penumpasan PKI Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 1963-1965*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Bawono, H. (2018). *Ansor dalam pertarungan ideologi*. In *Gerakan Pemuda Ansor: Dari Era Kolonial hingga pasca reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chandra, S. (2019). The Indonesian killings of 1965-1966: The case of Central Java, *Jurnal Critical Asian Studies*, Vol. 51, No.3.
- Damm, M. (2017). *Lubang Buaya, kuburan para pahlawan: abjeksi dalam historiografi Peristiwa 1 Oktober 1965*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, No.2.
- “Demonstratie in Pamekasan”. (1950). *Nieuwe Courant*.
- Fealy, G & McGregor, K. (2012). East Java and the role of Nahdlatul Ulama in the 1965-66 Anti-communist violence. In Kammen, D. and McGregor, K. (Ed.), *The Contours of Mass Violence in Indonesia*. Asian Studies Association of Australia in association with University of Hawai'i Press.
- Fealy, G & McGregor, K. (2010). Nahdlatul Ulama and the killings of 1965-66: religion, politics, and remembrance. *Indonesia*, No. 89.
- Feith, H. (1971). *The Indonesia election of 1955*. Southeast Asian Program Cornell University.
- John, T. (1986). Report from East Java. *Indonesia*, Vol. 41.
- Kartodirdjo, S. (1991). *Pendekatan Ilmu dalam Metodologi Sejarah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasdi, A. (2009). *Kaum merah menjarah; aksi sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* (2nd ed.). Yayasan Kajian Citra Bangsa dan Centre Indonesian Communities Studies.
- Kosim, M. (2007). Kyai dan blater; elite lokal dalam Masyarakat Madura. *Jurnal Karsa*, Vol.12(No.2).
- Leksana, G. (2020). Collaboration in mass violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist mass killings in 1965-66 in East Java. *Journal of Genocide Research*.
- “Letnan Kolonel Untung dari Tjakrabirawa Selamatkan Presiden Soekarno dan RI; Semata-mata Gerakan dalam Angkatan Darat”. (1965). *Warta Bhakti*.
- Minhadji, K. H. M. C. (1967). *Ichdisar riwayat hidup Alustadul Alimum Dakwatul Islam K. H. M. Djufri Marzuqi Assjahidul—Kabir*. The Sun.
- Mufrodi, A., Sapto, A., Wisnu., Sumarno., Nasution., Alrianingrum, S., Suhartoko., Kasdi, A., N Setiawan, N. (2019). *Sejarah Madura; Zaman Kerajaan, Kolonial, dan Kemerdekaan*. Pustaka Media Guru.
- Mun'im, H. A. (2013). *Benturan NU-PKI 1948-1965*. Langgar Swadaya.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *Jurnal Comtech*, Vol. 5, No.

- Robinson, G. (2017). Down to the very roots: The Indonesian army's role in the mass killings of 1965-66. *Jurnal Genocide Research*, Vol. 19, No. 4.
- Soejono, R. P & Leirissa, R. Z. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia VI; Zaman Jepang dan Republik*. Balai Pustaka.
- Suwirta, A. (2000). Mengkritisi peristiwa G30S 1965: dominasi sejarah Orde Baru dalam sorotan. *Jurnal Historia*, Vol.1.
- Tim Redaksi Koran Duta Masyarakat. (1965). *Berita daerah*. Duta Masyarakat.
- Utsman. H. (n.d.). *Hidup pejuang mati pejuang: Biografi As-Syahidul Kabir KH. M. Djufri Marzuqi (1925-1965)*.
- "Wat er feitelijk gebeurde; Aanvaardde de regent van Pamekasan bestuur voor negara of Republiek?" (1965). *De Locomotief*.
- Wawancara dengan Garuda Adikara (RP. M. Himam Awan Afghani, Interviewer). (16 Maret 2023).
- Wawancara dengan Marzuqi Djufri (RP. M. Himam Awan Afghani, Interviewer). (26 Maret 2023).
- Wawancara dengan Nadjibul Khoir (RP. M. Himam Awan Afghani, Interviewer). (15 Maret 2023).
- Yakin, N. A. (2006). Ulama pejuang, pejuang ulama; Biografi KH. RP. Muhammad Sya'roni Tjokro Soedarso pendiri Pondok Pesantren Darussalam, Jung Cang Cang Pamekasan. Pukad Hali.